Menari Sampai Mati:
Perlawanan Tandha' Terhadap Patriarki di Madura

Diajukan sebagai makalah diskusi terbatas Filsafat Ilmu, Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga

Khaerul Umam Noer

Surabaya - 2008

Abstrak

Madura, sebagai salah satu daerah di Jawa, merupakan pulau yang dianggap memiliki kultur patriarki yang sangat kuat, begitu kuatnya hingga pengaruhnya bahkan terbawa oleh para imigran Madura di daerah tempat mereka menetap. Siapa yang akan menyangka, di antara lantunan ayat kitab suci dan geliat ceramah agama para *keaye* terdapat suara lain, suara yang tidak hanya menggetarkan arena acara namun juga menjungkirbalikkan kekuasaan laki-laki, elite agama, bahkan perempuan kelas menengah Madura: Tandha'. Kehadiran tandha' dalam dunia kesenian Madura memberikan bukti nyata, bahwa perlawanan kaum perempuan masih eksis, bahkan di daerah paling terpencil sekalipun, tandha' menjadi suatu pertanda bahwa peneliti tentang Madura harus berpikir ulang mengenai posisi laki-laki di Madura. Makalah ini mencoba menguraikan posisi Tandha' dalam dunia sosial *oreng* Madura, bagaimana perjuangannya dalam memperoleh status sosial, dan tentu saja analisis yang digunakan berdasarkan model feminis.

Kata kunci: Tandha', Madura, Patriarki, Ekonomi, Feminis

Madura: Selayang Pandang

Madura terletak di timur laut pulau Jawa, kurang lebih 7º sebelah selatan dari khatulistiwa di antara 112º dan 114º Bujur Timur. Pulau tersebut dipisahkan dari Jawa oleh Selat Madura, yang menghubungkan laut Jawa dengan Laut Bali. Luas keseluruhan wilayah tidak kurang dari 5.304 km². Panjang Pulau Madura kurang lebih 190 km dan jarak yang terlebar pulau sebesar 40 km. Madura memiliki empat kabupaten, yaitu: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Adapun rincian luas keempat kabupaten: Bangkalan 1.260 km², Sampang 1.233 km², Pamekasan 792 km², dan Sumenep 1.989 km². Pantai utara merupakan suatu garis panjang yang hampir lurus. Pantai selatan dibagian timur memiliki dua teluk besar, terlindung oleh pulau-pulau, gundukan-gundukan pasir, dan batu-batu karang. Di sebelah timur terletak Kepulauan Sapudi dan Kangean yang termasuk administrasi Madura. Pulau-pulau terpenting adalah Sapudi, Raas, Gua-Gua, Kangean, Sapekan, dan Sapanjang, juga gugusan pulau kecil Masalembu, Masakambing, dan Keramian yang terletak antara Madura dan Kalimantan.

Madura memiliki gugusan bukit-bukit kapur yang lebih rendah, lebih kasar, dan lebih bulat dibandingkan bukit kapur di Jawa. Puncak tertinggi dibagian timur Madura adalah Gunung Gadu 341 m, Gunung Merangan 398 m, dan Gunung Tembuku 471 m. Iklim di Madura bercirikan dua musim,

musim barat atau musim hujan, dan musim timur atau musim kemarau. Curah hujan setiap bulan tidak lebih dari 200-300 mm, dengan komposisi tanah dan rendahnya curah hujan membuat tanah di Madura menjadi kurang subur dan kurang menguntungkan secara ekonomi, hal inilah yang membuat banyak orang Madura beralih pekerjaan menjadi nelayan, pedagang, atau bermigrasi. Hal tersebut tidak berarti sektor pertanian berhenti total, hanya saja tidak banyak dari orang Madura yang menggantungkan hidup dari sektor tesebut (de Jonge, 1989:3-9).

Manusia Madura: "*Buppa' Babbu' Guru Rato*"

Madura dapat dikatakan identik dengan Islam. Islam pada masyarakat Madura dapat dikatakan telah mendarah-daging yang berfungsi sebagai inti kebudayaan yang memuat ajaran moral dan etika pada masyarakat Madura. Namun demikian tidak semua kebudayaan Madura dapat di identikkan dengan Islam. Islam mempengaruhi masyarakat dan budaya Madura dalam banyak hal. Salah satu bentuknya adalah rasa hormat yang tinggi kepada kiai (*keaye*). Kiai menempati posisi sentral dalam bidang agama di Madura. Gelar kiai hanya diberikan pada orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan dianggap berjasa dalam dakwah. Mengaji merupakan hal kemampuan yang 'harus' dimiliki oleh orang madura. Ungkapan "*Ngaji reya bende akherat*" (mengaji sebagai modal akhirat) menempatkan guru ngaji/agama dan institusi pondok pesantren menjadi tumpuan dalam mempelajari agama Islam

Tidak mengherankan memang, kekuasaan kiai sebagai tokoh agama terlihat jelas pada ungkapan "*Buppa' Babbu' Guru Rato*" menempatkan kiai lebih tinggi dibandingkan pemerintah. Pada kasus Suramadu contohnya, betapa tarik-menarik antara kiai dan pemerintah telah membuat 'kisruh' pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut. Ulama atau kiai tidak hanya memiliki pengaruh berdasar alasan historis, namun juga kondisi ekologi [tegal] dan struktur pemukiman yang ada. Muncul pula kasus mobilisasi massa oleh kiai ke DPRD untuk menolak pertanggungjawaban Bupati Bangkalan. Kiai memiliki kekuasaan yang kuat karena berada pada pusat orientasi keagamaan dan sosial (Subaharianto, 2004:51-59).

Hal ini secara langsung atau pun tidak langsung membuat pengaruh kiai lebih kuat jika dibandingkan pemerintah. Terlebih pada daerah pesisir pantai, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Secara geografis, kondisi alam yang keras terutama daerah pantai membuat psikologi masyarakat Madura memiliki kemauan dan tekad, serta pantang mundur, dan terbuka. Secara budaya, karena adanya tekad yang tersebut, membuat masyarakat menjadi masyarakat yang kurang apresiatif terhadap berbagai keputusan pemerintah, hal ini diperparah dengan lebih taatnya masyarakat terhadap kiai dibandingkan dengan pemerintah. Permasalahan semakin kompleks dengan banyaknya kemiskinan di Madura. Tidak berlebihan jika faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap psikologi masyarat Madura.

Suami Madura: Kepemilikan Terhadap Istri dan Keluarga

Laki-laki Madura sangat menjunjung tinggi rasa hormat, tidak mengherankan jika muncul kasus-kasus *carok* sebagai 'ganti rugi' atau 'pembayaran' secara sosial untuk mengembalikan harga diri dan menghapus *todhus* dan/atau *malo'* pada seseorang yang membuat diri orang Madura tersebut merasa malu. Jika *todhus* berarti malu dalam pengertian etika, maka *malo* berarti malu dalam kaitannya dengan penghinaan dan harga diri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiyata (2002), terungkap bahwa seringkali, bahkan mayoritas (60,4%) kasus *carok* terjadi karena rasa *malo* yang terkait dengan masalah perempuan, sehingga jika orang lain terkait dengan urusan perempuan, maka hal tersebut dianggap menginjak-injak harga dirinya, dan hanya ada satu jalan dalam memperbaiki harga diri: carok. Tindakan carok yang dilakukan karena motif pelecehan istri tidak hanya mendapatkan izin sosial, tetapi juga dorongan dari lingkungan sekitarnya. Kiai yang menjadi tokoh sentral bagi masyarakat Madura juga mendukung tindakan carok jika itu dilakukan karena pelecehan terhadap istri.

Perempuan menjadi 'milik' si suami sepenuhnya, berada di bawah pengawasannya. Kepemimpinan mutlak ada di tangan suami (laki-laki). Laki-laki lah yang berhak menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan karena perempuan adalah miliknya. Karena

perempuan menjadi pusat harga diri laki-laki, maka perempuan menjadi makhluk yang terproteksi, diawasi, dan dimiliki oleh laki-laki.

Pengawasan terhadap perempuan dapat terlihat dengan jelas pada pola permukiman *Tanean Lanjhang* yang merupakan kelompok pemukiman yang dihuni oleh keluarga batih yang isolatif dari kelompok pemukiman lain. Isolasi ini terlihat secara fisik maupun 'aturan main'. Seorang laki-laki yang bukan dari *tanean*-nya tidak diperkenankan masuk ke dalam suatu *tanean*, terlebih lagi jika tidak ada laki-laki di dalam *tanean* tersebut. Model pemukiman *tanean lanjhang* terkait dengan proteksi orang tua (ayah dan kakek) terhadap anak perempuannya atau secara umum pengawasan laki-laki terhadap perempuan. Jika pemakai rumah adalah perempuan, maka pemakai surau adalah laki-laki, sebab laki-laki hanya menempati rumah pada malam hari sedangkan siang hari mereka bekerja di ladang.

Tandha': Gambaran Singkat

Sebagai suatu profesi, tandha'[1] seringkali mendapatkan cibiran, terutama sebagian masyarakat kelas menengah (termasuk diantaranya adalah perempuan) yang menganggap profesi tandha' kurang bermartabat karena selalu diasosiasikan dengan pelacuran terselubung. Persoalannya

[1] Masyarakat Madura menggunakan istilah tandha' yang mengacu pada dua hal: (1) jenis kesenian dan (2) penari perempuan. Secara umum, istilah tandha' merujuk pada penari perempuan, namun karena posisinya sangat dominan sehingga pertunjukkannya pun dinamai dengan tandha'. Ketika berbicara mengenai tandha' dalam konteks kesenian maka hal ini dapat dianggap sama dengan tayub dan variasi pengucapannya. Tandha' dalam konteks personal pun seringkali dianggap sama dengan sindhen, meskipun istilah sindhen agak jarang digunakan oleh Masyarakat Madura.

adalah, seringkali kesalahan dalam memahami sesuatu akan membawa pada kecurigaan dan kekeliruan dalam memberikan penilaian.

Seorang tandha’ dengan sendirinya adalah pimpinan kelompok tayub di mana ia berada. Semua orang dalam kelompok tersebut, baik laki-laki maupun perempuan harus tunduk pada seorang tandha’, jika ada yang tidak patuh sangsinya sangat berat: dikeluarkan. Seorang tandha’ tidak menduduki jabatan formal sebagai ketua, namun tandha mengambil posisi sebagai wakil ketua. Ketua dari grup tayub bertugas melakukan transaksi tawar-menawar dengan penanggap, sedangkan tandha’ memegang manajemen dan kendali pada saat grup tersebut tampil (Srinthil 2007b).

Sebelum seseorang menjadi tandha’, umumnya dia menjadi *nayaga*, hingga banyak laki-laki yang ‘*menandha*’ dan memintanya untuk *ron-toron*[2] (turun menemani), dengan banyaknya permintaan dan semakin dikenalnya *nayaga* yang *ron-toron* tadi, maka ia dapat beralih menjadi tandha’. Pada umumnya, semua perempuan yang berprofesi sebagai tandha’ memang meniti karir sebagai *nayaga*.

Sebagai suatu profesi, tandha’ memang memberikan jaminan kehidupan yang jauh lebih baik. Dalam setiap pemantasan, seorang tandha’ memperoleh penghasilan sebesar Rp. 500-750 ribu rupiah, belum dari

---

[2] *Ron-toron* pada dasarnya adalah mekanisme untuk mencapai dua tujuan: *Pertama*, berfungsi sebagai jalur yang sah dari seorang *nayaga* untuk menjadi seorang tandha’. *Kedua*, berfungsi untuk memperkenalkan sosok baru untuk menggantikan tandha yang akan mengundurkan diri

saweran dengan kisaran 1-3 juta rupiah. Menjadi tandha' merupakan tanggung jawab untuk menjadi penyangga kehidupan ekonomi keluarga, bukan hanya pada keluarga inti, namun juga pada keluarga batih. Menjadi tandha' merupakan jalan untuk mendapatkan akses di bidang ekonomi dan pada gilirannya mengambil-alih 'tugas' suami sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang tandha', penghasilannya selama tiga tahun diyakini cukup untuk menutupi seluruh biaya yang akan ia keluarkan bahkan hingga ia meninggal.

Menjadi tandha' merupakan kelebihan yang hanya dinikmati oleh segelintir perempuan Madura. Penelitian Bouvier (2002) tentang kesenian di Madura menjelaskan bahwa perempuan Madura tidak memiliki kebebasan untuk 'keluar malam', terlebih untuk menonton pertunjukan kesenian, hal ini pula yang menyebabkan profesi tandha' tidak banyak mengalami persaingan. Perempuan Madura tidak boleh meninggalkan *tanean lanjhang* tanpa didampingi oleh saudara laki-laki atau hanya berdiam di rumah saja.

Dapat dikatakan hanya kesenian tandha' di mana perempuan menjadi unsur yang sangat dominan. *Saweran* seringkali dimaknai bahwa kesenian tandha tidak lebih dari 'pelacuran terselubung', di mana seorang perempuan dikelilingi oleh beberapa orang laki-laki untuk menari bersama dan kemudian menyerahkan sejumlah uang sebagai *saweran*.

Pandangan yang terlalu simplistis ini terjadi karena kesalahan dalam memahami mekanisme kerja tandha'. Seorang laki-laki tidak datang kepada tandha' dengan sendirinya, dalam artian hanya laki-laki yang '*ketiban sampur*' atau *penjhung* (selendang) yang boleh menari bersama tandha', *penjhung* ini diedarkan oleh *gelandang* atau oleh tandha' sendiri. Seorang laki-laki yang ingin menari bersama tandha' harus bersikap pasif sebesar apapun keinginannya untuk menari bersama tandha' (Srinthil 2007b:21).

Persoalan yang seringkali tidak dipahami adalah, bahwa di atas panggung tandha' lah yang memegang kendali sepenuhnya. Seorang tandha' berhak untuk melemparkan *penjhung* atau menurunkan seseorang yang berbuat tidak senonoh kepada dirinya. Di atas panggung, berbagai tindakan yang dilakukan oleh para laki-laki yang menari bersama tandha' mendapatkan kontrol langsung dari masyarakat. Bahwa tandha' adalah 'milik bersama', maka setiap usaha untuk melecehkan seorang tandha' di atas panggung jelas akan berakibat fatal. Oleh karena itu, setiap tindakan yang tidak senonoh tidak akan ditemukan di atas panggung.

Seorang tandha' pun tidak boleh memperlihatkan raut wajah menggoda ketika bernyanyi ataupun menari, hal yang sama sebenarnya dengan yang terjadi pada penari Gandrung dari Banyuwangi (lihat Srinthil 2007a). Hal ini sangat jauh berbeda dengan 'teman-teman' tandha', seperti

penari Ronggeng ataupun Dombret dari wilayah Indramayu yang memang memasang wajah sesensual mungkin.

Tandha' merupakan bagian penting dari sejarah kesenian di Madura, terutama di Wilayah Sumenep. Kesenian tandha' telah mengambil tahta dari tayub yang semula dipegang oleh laki-laki. Hingga tahun 80-an, terjadi perpindahan kelompok karawitan, dari yang semula semua instrumen dimainkan oleh laki-laki, kemudian perlahan mulai digantikan oleh karawitan yang anggotanya perempuan. Tahun 2003, menurut data Disparbud Kab. Sumenep, dari dua puluh enam kelompok karawitan, sembilan belas adalah kelompok karawitan putri, dan dari tujuh kelompok karawitan laki-laki yang ada hanya ada dua yang dapat dikatakan eksis (Srinthil 2007b).

Tandha' dalam Kerangka Kerja Feminis

Penulis telah mencoba memberikan gambaran mengenai ruang lingkup wilayah geografis dan kultural Madura meskipun dengan singkat sekali, penulis juga telah memberikan gambaran singkat mengenai apa itu tandha' serta hal-hal yang terkait. Pada sub-tema ini dan seterusnya penulis mencoba untuk menganalisis tandha' menggunakan kerangka kerja feminis. Di antara sekian banyak teori feminis, penulis hanya akan memilih untuk menggunakan teori feminis liberal, karena bagi penulis, model analisis feminis liberal lebih mampu untuk menjelaskan persoalan tandha' dibandingkan model analisis feminis lainnya.

Salah satu asas dalam feminisme liberal adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan hak mereka untuk mengembangkan kemampuan dan rasionalitasnya secara optimal (lihat Tong 2005). Bagi feminisme liberal, tidak ada satupun pihak yang boleh merenggut hak tersebut, pelanggaran atas hak tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dengan demikian siapa pun yang merenggut hak tersebut adalah penjahat kemanusiaan dan patut dihukum mati.

Bagi penganut feminisme liberal, dengan adanya persamaan tersebut, maka diskriminasi dalam bentuk apapun juga melanggar hak asasi manusia. Diskriminasi hadir dan berintikan pada prasangka yang terdapat dikalangan laki-laki. Prasangka merupakan konsekuensi logis dari adanya ketimpangan dalam proses sosialisasi semasa anak-anak, dimana antara laki-laki dan perempuan telah disosialisasikan nilai-nilai dan ciri-ciri maskulin *vis a vis* feminin. Hal ini selalu mendasarkan pada adanya pembedaan secara biologis, dan hal ini lah yang ditentang oleh feminisme liberal.

Feminisme liberal menolak anggapan bahwa perempuan lemah (dan ciri-ciri lainnya) sebagai konsekuensi atas perbedaan biologis, sehingga berbagai akses penting bagi perempuan menjadi tertutup bahkan tersendat. Bagi feminis liberal, kunci untuk menghapus diskriminasi adalah akses yang sama atas pendidikan dan kesempatan kerja. Tentu hal ini membawa konsekuensi logis: siapa pun yang melakukan diskriminasi – apalagi terhadap

perempuan – dalam bidang pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta akses yang sama untuk meningkatkan rasionalitas dan kemampuan adalah penjahat kemanusiaan.

Hampir seluruh Tandha' adalah perempuan yang akses terhadap pendidikannya tertutup karena faktor kemiskinan, tentu saja kemiskinan pula yang 'memaksa' mereka untuk terjun dalam dunia kesenian tandha'. Mereka secara pasti mengetahui dan menyadari bahwa keberadaan mereka bukan tanpa masalah. Sejak era 60-an, kalangan NU dan Masyumi memaksa agar tandha' menjadi suatu institusi kesenian yang lebih islami, diantaranya dengan mengubah pakaian yang dipergunakan, gerak tari di atas panggung dan jenis lagu yang dibawakan. Jika sebelumnya seorang tandha' menggunakan *rape'* (kemben)[3], maka saat ini seluruh tandha' di Sumenep menggunakan kebaya tertutup.

Kuatnya pengaruh kelompok agamawan pada saat itu praktis membuat seluruh kesenian rakyat yang ada di Sumenep seperti klèningan dan tandha' 'tiarap', hanya musik melayu yang masih dapat hadir sebagai ruang ekspresi seni di Sumenep (Srinthil 2007b). Diskriminasi juga terjadi bagi semua perempuan yang hendak keluar pada masa itu, yakni dengan keluarnya fatwa ulama bahwa seorang perempuan yang hendak keluar harus

[3] Terdapat catatan yang cukup menarik mengenai penggunaan *rape*', menurut Abdul Kamar dan Muhammad Hasan, sejak dahulu tandha' atau sindhen Madura tidak pernah menggunakan *rape*', kalaupun ada yang menggunakan *rape*' adalah sindhen dari Jawa yang kebetulan pentas di Sumenep. Apakah betapa masifnya pengaruh kelompok agamawan mengenai penggunaan *rape*' telah menghapus ingatan kolektif orang seni di Madura masih menjadi tanda tanya (lihat Ryansyah dan Hamdhi 2007).

ditemani oleh orang lain yang masih keluarganya. Pada era itu, Masyumi pun terlihat sangat gencar untuk merazia para perempuan yang hendak keluar yang hanya sendiri, bahkan mereka melarang para tukang ojek untuk mengangkut penumpang perempuan, hal ini pula yang kemudian menjadi konflik antara Masyumi dengan PNI (Ryansyah dan Hamdhi, 2007).

Kehadiran tandha' tidak hanya menimbulkan konflik antara tandha dengan para elite agama Islam di Sumenep, namun juga dengan sebagian perempuan kelas menengah di Sumenep. Baik para elite agama maupun perempuan kelas menengah meyakinkan banyak pihak bahwa tandha' adalah pertunjukan yang hanya menampilkan 'aura syahwat', tidak islami, dan menampilkan seni rendahan yang tidak pantas untuk dipertunjukkan. Berdalihkan aturan agama, bahwa para tandha' adalah orang-orang yang tidak mengerti agama, mereka berlindung dan lupa melihat realitas yang sebenarnya.

Pandangan tersebut sangat mungkin ada karena adanya pengaruh ideologi gender. Secara sangat sederhana, ideologi gender adalah bagaimana kedua jenis kelamin dipersepsikan, dinilai dan diharapkan untuk bertingkahlaku. Ideologi gender akan dengan ketat mengatur setiap orang agar berjalan sesuai dengan 'jalurnya', di mana segala kemungkinan untuk mengembangkan diri di luar jalur jelas tidak dimungkinkan. Menurut Alison

Jaggar (1983) setiap orang berhak menggunakan nalar dan kemampuannya untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya.

Adanya ideologi gender telah mengkonstruksi para elite agama untuk berlindung di bawah naungan agama, dan para perempuan kelas menengah untuk berlindung pada status ekonomi yang mereka miliki. Tandha' adalah sama seperti warga negara lainnya, dengan demikian memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti para elite agama maupun perempuan kelas menengah lainnya. Jika menggunakan kerangka feminis liberal, jelas bahwa apa yang dilakukan oleh tandha' adalah haknya untuk mengembangkan diri dalam mencapai tujuan-tujuan apapun yang ia inginkan.

Perempuan kelas menengah dalam hal ini memiliki posisi yang ambigu, sebagian dari mereka dengan lantang menentang adanya tandha' sebagai bentuk kesenian yang 'merendahkan' perempuan, dan sebagian lainnya memilih untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Dalam sebuah wawancara dengan Jurnal Srinthil (2007b:33-34), Bu Ida, seorang rektor universitas swasta di Sumenep mengatakan:

> "Perempuan yang ideal itu tidak lepas dari kodrat, yaitu tanggungjawab di keluarga dan masyarakat. Perempuan ideal adalah mereka yang bida berperan baik dan bisa menjadi teladan di masyarakat dan keluarga....perempuan ideal adalah perempuan yang anggun, terdidik dan bermoral karena mereka akan menjadi teladan di keluarga dan mangambil peran yang bermanfaat di masyarakat"

Pendapat di atas jelas sangat menyudutkan tandha', sebab tidak ada satu pun di antara 'ciri-ciri perempuan ideal' yang menurutnya bisa diberikan kepada tandha'. Feminis liberal menolak anggapan keliru dari perempuan kelas menengah yang pengaruh statusnya bahkan membuatnya lupa kalau dia pun perempuan yang belum tentu sudah ideal. Mary Wollstonecraft ([1975] dalam Tong, 2005:18-19) mengatakan betapa kekayaan telah berdampak negatif terhadap perempuan borjuis abad ke-18, Wollstonecraft mempersamakan keadaan mereka seperti burung dalam sangkar, bagaimana mereka "berjalan dengan keagungan yang palsu dari tonggak satu ke tonggak yang lain". Bagi Wollstonecraft, perempuan kelas menengah adalah perempuan peliharaan yang mengorbankan kebebasan dan moralitasnya untuk prestise, kenikmatan, dan kekuasaan yang disediakan suaminya.

Para feminis liberal dapat dipastikan akan mendukung sepenuhnya semua keputusan yang diambil oleh tandha' untuk tampil dan memaksimalkan setiap potensi nalar dan kemampuannya untuk kesejahteraan dirinya. John Stuart Mill dan Harriet Taylor (dalam Tong, 2005:23) mengatakan bahwa cara yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kebahagiaan adalah dengan membiarkan setiap individu untuk mengejar apa yang mereka inginkan, selama mereka tidak saling membatasi atau menghalangi di dalam proses pencapaian tersebut. Hal ini

lah yang dilakukan oleh tandha', bahwa mereka mengejar apa yang mereka inginkan tanpa sekalipun berusaha untuk menjegal tandha' lain ataupun merugikan orang-orang disekitarnya.

Persoalannya, ketika penampilan tandha' yang notabene perempuan di ruang-ruang publik, tanpa ragu menampilkan pesonanya – terlepas apakah tandha' secara sengaja atau tidak dalam menampilkan sisi sensualitas yang dimilikinya, hal ini rupanya membuat beberapa pihak berang dan melawan balik terhadap apa yang dilakukan oleh tandha'. Resistensi tandha' terhadap para opisisi dalam masyarakat adalah kemampuan tandha' tersebut untuk tetap eksis dalam ruang dan gatra yang seringkali diberikan kepada laki-laki. Nilai-nilai pemingitan dan pembagian ruang yang tegas, antara ruang privat dan publik, rupanya masih menjadi persoalan tersendiri di Madura.

Dalam pola permukiman *tanean lanjhang*, rumah dan dapur atau ruang privat adalah milik perempuan, sedangkan surau dan ladang atau ruang publik adalah milik laki-laki. Pembatasan yang kaku mengenai pembagian ruang ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap kesenian. Adalah fakta yang tidak dapat di sangkal bahwa kesenian tandha', dahulu hanya di sebut karawitan di pegang sepenuhnya oleh laki-laki dan pada masa itu, perempuan hanya bertindak sebagai sindhen yang tidak memiliki posisi apa-apa, di mana seluruh *nayaga* dipegang oleh laki-laki. Tandha' pada saat ini telah berubah dengan sangat luar biasa, perempuan memegang kendali

penuh atas kesenian tandha', dan tandha' lah yang memegang otoritas penuh terhadap seluruh pemain baik laki-laki maupun perempuan.

Pembagian ruang yang jelas membuat berbagai usaha adaptif dilakukan oleh para tandha', bahkan pada masa lalu. Perilaku adaptif ini merupakan suatu bentuk usaha untuk menjaga keberlangsungan kesenian tandha'. Persoalannya tidak menjadi lebih sederhana, bahwa setiap usaha yang dilakukan untuk tidak terlalu menyinggung para elite agama rupanya masih belum cukup, sebagai perempuan mereka masih di tuntut untuk berada di rumah dan menghabiskan masa tuanya sambil bergantung pada penghidupan yang diberikan oleh suaminya.

Kebenaran, Subjektivitas Perempuan dan Pencarian Tanpa Akhir

Siapa yang berhak menentukan bahwa sesuatu itu benar? Siapa berhak menentukan bahwa apa yang dilakukan oleh tandha' itu salah? Otoritas apa yang mereka miliki sehingga merasa bahwa dirinya adalah sosok yang mampu memutuskan tandha' adalah 'bukan perempuan baik-baik'?

Linda Alcoff dan Elizabeth Potter (1993) secara tegas menyatakan bahwa tidak ada otoritas apapun yang berhak mengopresi perempuan. Simone de Beauvoir (2003) pernah mengatakan bahwa seseorang tidak lahir dilahirkan melainkan menjadi perempuan. Perempuan dalam hal ini bukanlah dilihat sebagai suatu entitas yang didasarkan pada pertimbangan biologis,

namun harus dilihat sebagai suatu proses menjadi, suatu proses yang penuh kekuatan tarik menarik. ‘becomes a woman’ menjadi suatu kata kunci, bahwa proses adalah segalanya, tentu saja kita tidak akan berbicara mengenai hasil jika proses belum pernah jalani. Proses menjadi, atau dalam hal ini ‘proses menjadi perempuan’ seakan menjadi suatu mekanisme kerja atau proses yang tanpa akhir, selalu bergerak, tidak statis, dan tentu saja melelahkan. Pada proses ini, tidak seorang pun berhak mengatakan siapa yang benar, masing-masing individu lah yang menentukan, apakah dirinya benar atau tidak.

Jika Beauvoir sebagai feminis eksistensialis menganggap bahwa proses ‘menjadinya’ suatu individu sebagai hal yang paling krusial, lalu bagaimana dengan masyarakat? Lynn Hankinson Nelson (1993) menyatakan bahwa komunitas, bukan individu, yang berhak memberikan putusan mengenai apa yang dianggap benar dan tidak. Keputusan seorang individu untuk menolak sesuatu adalah keputusan yang bersifat personal, dalam pengertian bahwa keputusan tersebut selama bukan merupakan konsensus bersama antar anggota dalam komunitas tidak lah dapat mewakili komunitas tersebut. Komunitas lah yang menjadi bagian utama dari segala sesuatu yang terkait dengan pengetahuan (knowledge). Hal yang sama juga diakui oleh Longino (1993) dan Potter (1993), bahwa klaim yang dilakukan oleh

individu atas kebenaran dan pengetahuan adalah klaim yang tidak sah, sebab hanya komunitas yang memiliki hak untuk itu.

1. Pencarian terhadap kebenaran tidak hanya berlangsung dalam masyarakat, namun juga dalam dunia akademik. Dalam penelitian tentang perempuan, jelas bahwa model pendekatan yang menggunakan positivisme sebagai pijakan awal tidak dapat dipergunakan. Sandra Harding (1993) mempertanyakan apa yang di maksud dengan objektivitas. Baginya, meskipun peneliti telah mengikuti aturan penelitian tradisional dengan tepat mereka tidak akan mampu mencapai objektivitas yang kuat. Hanya penelitian yang menjadikan objek penelitian menjadi subjek sekaligus guru bagi peneliti yang akan mampu mendapatkan hasil nyata, terutama dalam studi perempuan. Lubis (2006) cukup banyak mengutip tokoh feminis yang menolak penggunaan model yang menjadikan peneliti (umumnya laki-laki) berada di atas objek yang diteliti (umumnya perempuan).

Kebenaran seringkali menjadi persoalan yang sangat pelik, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Tidak berarti bahwa perempuan menolak apa yang disebut dengan kebenaran, melainkan siapa yang memutuskan sesuatu itu benar. Millet ([1977] 1992) menolak klaim-klaim sepihak tersebut karena merupakan aspek sistemik dari ideologi patriarki. Setiap usaha untuk

menentukan kebenaran secara sepihak untuk melawan perempuan merupakan ‘kejahatan kemanusiaan’.

Pembebasan perempuan menjadi agenda sekaligus konsensus yang dicapai oleh para feminis, meskipun dalam beberapa hal terjadi perbedaan dalam cara mencapainya. Perempuan dan berbagai masalah yang dihadapinya terkait bukan hanya dengan dimensi sosial dan budaya, namun juga ideologi, agama dan negara. Nancy Hartsock (1981a) mengeluhkan, bahwa sejak jaman Roma perempuan selalu menjadi warga negara kelas dua, akibatnya jelas, perempuan selalu terbebani oleh kewajiban tanpa kepastian mengenai hak-hak yang dimilikinya.

Jaggar (1983) mengatakan dengan jelas sekali, bahwa pemenuhan hak perempuan adalah prioritas yang harus diutamakan. Sebagai seorang perempuan, semua tandha’ memiliki keluarga, dan mereka terbebani oleh tugas mereka dalam pengasuhan anak-anak mereka, meskipun dalam aktivitas sehari-hari terjadi proses tawar-menawar, yakni dengan mengalihkan tugas tersebut pada pihak ketiga. Sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya, posisi tandha’ sangat rentan dalam rumah tangganya. Hal yang sama juga terjadi di lingkungan kerjanya, yakni munculnya gangguan seksual.

Bagi Diedre Silverman (1981), gangguan dalam lingkungan kerja adalah bukti nyata dari sistem ideologi patriarki yang seksis, bahwa

masuknya perempuan dalam ruang publik dianggap sebagai sebagai suatu ancaman atau gangguan semacam itu sengaja dilakukan untuk menunjukkan adanya dominasi laki-laki atas perempuan yang bekerja itu. Para tandha' di Madura pun mengalami hal yang sama, mereka seringkali menjadi topik pembicaraan di antara laki-laki di warung-warung kopi, seorang tandha' misalnya seringkali dijuluki '*se`egeriming*' (secara seksual, menggetarkan) (Srinthil 2007b).

Kehidupan tanda jelas jauh dari hingar bingar daerah perkotaan, karena tandha' hanya terdapat di wilayah pedesaan di Sumenep, namun demikian, tidak berarti posisi mereka menjadi tidak penting untuk diperhatikan dengan seksama. Kehidupan tandha' yang jelas hidup dalam dua ruang sekaligus, baik itu ruang privat maupun ruang publik. Semua hal yang terjadi pada diri tandha' pada dasarnya memiliki kesamaan dengan opresi yang terjadi pada semua perempuan, yakni dengan berkembangnya suatu ideologi gender yang mengikat. Sekurang-kurangnya terdapat tiga macam contoh dari bentuk ideologi umum, yaitu: (1) nilai pemingitan, (2) nilai pengucilan dari bidang tertentu, dan (3) nilai femininitas perempuan (Saptari dan Holzner 1977). Ketiga hal tersebut mungkin terlihat terpisah satu dengan lainnya, padahal ketiganya adalah satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Ketiganya adalah 'jerat' yang saling berjalin-berkelindan membentuk sebuah ideologi dominan: patriarki.

Nilai pemingitan misalnya, menjadi alasan utama atas keterpurukan perempuan dalam bidang publik, bagaimana perempuan selalu 'dipingit' dalam ruang-ruang domestik. Pemingitan atas nama adat dan agama menjadi alasan bagaimana perempuan sangat dibatasi langkahnya di sektor-sektor publik. Pun kaum perempuan berada di sektor domestik dengan melepaskan keinginannya untuk berada di ruang publik, kaum perempuan akan selalu terikat pada struktur dominan, yakni sebagai *kanca wingking* tanpa pernah mendapatkan kesempatan yang sama atau pun kondisi yang sama dengan yang dirasakan oleh laki-laki.

Jika perempuan tetap *mbalelo* dengan tetap terjun di ruang publik, maka tetap terjerat dalam keadaan yang marginal. Kesempatan kerja yang mereka miliki sangat terbatas, mereka pun harus saling bersaing di antara sesama mereka untuk memperebutkan kesempatan yang *kelewat* sedikit. Kaum perempuan tetap berada di posisi marginal karena adanya nilai-nilai pengucilan dari bidang-bidang tertentu, bidang-bidang yang pada gilirannya sangat berkaitan dengan kondisi pada *point* ketiga, yakni nilai femininitas perempuan. Hampir sebagian besar – jika tidak ingin mengatakan semua – lapangan kerja yang tersedia bagi perempuan dikaitkan dengan nilai-nilai femininitas: tekun, cermat, telaten, tidak mau ribut, pasrah, dll dst dsb.

Tandha' sebagai suatu bentuk representasi perlawanan terhadap hegemoni laki-laki di Madura merupakan aktor penting yang setiap gerak dan

langkahnya menjadi sorotan. Sebagai aktor perlawanan, keberadaan tandha' jelas tidak dapat di pandang sebelah mata. Kehadiran tanda bukan hanya perlawanan terhadap para elite agama atau pun para perempuan kelas menengah, kehadirannya merupakan perlawanan terhadap ideologi gender.

Hartsock (1981b) meyakinkan bahwa perjuangan perempuan harus dilihat sebagai proses yang berjalan tanpa akhir, sebuah proses untuk melawan adanya suatu konstruksi yang dipaksakan oleh kelompok yang dominan, yakni laki-laki dengan ideologi patriarkinya. Keberadaan tandha' jelas bukan lawan yang ringan bagi laki-laki, termasuk didalamnya elite agama maupun perempuan kelas menengah. Posisi ekonomi tandha' yang sudah jauh lebih baik sebelum menjadi tandha' membantu mengubah dan menjadikan semuanya menjadi jauh lebih mudah.

Boleh jadi Madura dikatakan sebagai daerah di Indonesia yang proses islamisasinya sudah selesai, namun *toh* selalu muncul upaya dari kelompok masyarakat yang menjadikan agama Islam sebagai mekanisme untuk menyerang orang, dan dalam hal ini tandha' telah melakukan resistensi yang begitu baik. Wollstonecraft (dalam Lubis, 2006:82) menuntut kesamaan dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan, sehingga perempuan tidak lagi tergantung dari sisi ekonomi.

Kemampuan seorang tandha' dalam bidang ekonomi menandai adanya suatu usaha untuk menjungbalikkan kekuasaan laki-laki, setidaknya

mereka telah berhasil menundukkan suami mereka di rumah dan menegosiasikan ‘tugas-tugas rumah tangga’. Konflik yang muncul antara tandha’ dengan para elite agama dan antara tandha dengan perempuan kelas menengah nampaknya merupakan konflik yang berkepanjangan dan tanpa akhir. Tandha’ seakan menjadi anomali dalam kehidupan Orang Madura yang dikatakan islami, bahwa keberadaan tandha’ seakan menjadi *counter culture* terhadap budaya Madura yang patriarkat adalah hal yang sangat menarik dikaji.

Keberadaan tandha’ saat ini jelas tidak lagi dapat disingkirkan sebagaimana pernal dilakukan pada era 60-an, keberadaannya telah menjadi milik masyarakat. Di lingkungan masyarakat, keberadaan tandha’ barangkali masih mencari suatu posisi yang lebih baik, namun setidaknya di lingkungan keluarganya, seorang tandha’ tidak lagi ragu untuk melakukan perlawanan terhadap opresi yang dilakukan dalam rumah tangganya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Suhadiyah, seorang tandha’ dari Saronggi, kepada suami “Ayo bercerai kalau berani!!!” (lihat Srinthil 2007b).

Tandha’ adalah suatu fenomena kultural yang menyeruak di balik kibasan sarung dan gesekan *rukuh*, dan suara tandha’ tetap akan mengalun di antara alunan ayat al Quran dan gegap-gempita ceramah agama. Alcoff dan Potter (1993) memberikan suatu batasan yang jelas mengenai siapa yang berhak untuk menentukan siapa yang paling benar ketika berbicara soal

perempuan. Baginya, tidak ada kebenaran absolut, sebab semua orang masih dalam suatu proses pencarian, dan dalam proses itu setiap orang sedang berusaha untuk mendefinisikan diri, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengintervensi proses ini. Tandha' tidak butuh bantuan untuk mendefinisikan diri mereka, mereka adalah aktor sejarah, di mana setiap waktu mereka dapat dengan bebas mendefinisikan diri mereka sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam penutup editorial dalam jurnal Srinthil (2007b) "Biarkan dia mendefinisikan diri dan biarkan pula dia memainkan sejarahnya sendiri".

Kepustakaan:

Alcoff, Linda dan Elizabeth Potter
1993 "Introduction: When Feminisms Intersect Epistemology" dalam L. Alcoff dan E. Potter *Feminist Epistemologies*. NY: Routledge, Chapman and Hall, Inc. Hlm. 1-14

de Beauvoir, Simone
2003 *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Cetakan pertama. Surabaya: Pustaka Promethea

Bouvier, Hélène
2002 *Lébur!: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*. Jakarta: Forum Jakarta-Paris, YATL, YOI

Harding, Sandra
1993 "Rethinking Standpoint Epistemology: 'What Is Strong Objectivity'?" dalam L. Alcoff dan E. Potter *Feminist Epistemologies*. NY: Routledge, Chapman and Hall, Inc. Hlm. 49-82

Hartsock, Nancy

1981a “Political Change: Two Perspectives on Power” dalam *Building Feminist Theory, Essays From Quest, a Feminist Quarterly*. NY; Longman, Inc. Hlm. 3-18

1981b “Fundamental Feminism: Process and Perspective” dalam *Building Feminist Theory, Essays From Quest, a Feminist Quarterly*. NY; Longman, Inc. Hlm. 32-43

Jaggar, Alison M.
1983 *Feminist Politics and Human Nature*. Totowa, NI: Rowman & Allanheld

de Jonge, Huub
1989 *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam*. Jakarta: Gramedia

Longino, Helen
1993 “Subjects, Power and Knowledge: Description and Prescription in Feminist Philosophies of Science” dalam L. Alcoff dan E. Potter *Feminist Epistemologies*. NY: Routledge, Chapman and Hall, Inc. Hlm. 101-120

Lubis, Akhyar Yusuf
2006 *Dekonstruksi Epistemologi Modern: Dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme hingga Cultural Studies*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu

Millet, Kate
1992 “Sexual Politics [1977]” dalam Maggie Humm (ed.) *Feminism, a Reader*. NY: Harvester Whetsheaf. Hlm. 61-65

Nelson, Lynn Hankinson Nelson
1993 “Epistemological Communities” dalam L. Alcoff dan E. Potter *Feminist Epistemologies*. NY: Routledge, Chapman and Hall, Inc. Hlm. 121-160

Potter, Elizabeth
1993 “Gender and Epistemic Negotiation” dalam L. Alcoff dan E. Potter *Feminist Epistemologies*. NY: Routledge, Chapman and Hall, Inc. Hlm. 161-186

Ryansyah dan Inung A.Z. Hamdhi
2007 “Sejarah Tandha’: Sejarah Penyingkiran dan Perlawanan” dalam *Srinthil* (13):46-57

Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner
1977 *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Suatu Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Silverman, Deirdre
1981 “Sexual Harassment, Working Women’s Dilemma” dalam *Building Feminist Theory, Essays From Quest, a Feminist Quarterly*. NY; Longman, Inc. Hlm. 84-93

Srinthil
2007a *Penari Gandrung dan Gerak Sosial Banyuwangi*. Jakarta: KP Desantara

2007b *Tandha, Jungkir Balik Kekuasaan Laki-Laki Madura*. Jakarta: KP Desantara

Subaharianto, Andang. dkk
2004 *Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur Menjunjung Leluhur*. Malang: Bayu Media Publishing

Tong, Rosemarie Putnam
2005 *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Jalasutra

Wiyata, Latif
2002 *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS